



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**UNIT KERJA** : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMINGRASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NANIK NUR KHOLILAH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 725101

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 795.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/117 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1940 m2 di BATANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 777 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 2550 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/35 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 98.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 150.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 893.150.000

**III. HUTANG** Rp. 459.338.208

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 433.811.792

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.